

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis saat ini berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut terjadi dalam semua sektor industri baik di sektor dagang, sektor manufaktur dan sektor jasa. Semua entitas bisnis berupaya keras untuk meningkatkan kualitas bisnisnya. Peningkatan kualitas entitas bergantung pada informasi ekonomi yang bisa menjelaskan keberadaan dan perkembangan entitas tersebut bagi pihak-pihak lain yang berhubungan dengan entitas. Penyajian informasi terkait dengan aktivitas ekonomi entitas dapat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan yang lengkap untuk entitas tanpa akuntabilitas publik menurut SAK ETAP (2009, par. 3.12) terdiri atas: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (Sugiri dan Agus, 2011: 23). Oleh karena itu dengan perkembangannya juga menyebabkan tuntutan atas relevansi dan keandalan laporan keuangan pun semakin tinggi. Tuntutan ini muncul agar tidak terjadi konflik antar pengguna laporan keuangan dan manajemen. Sehingga dibutuhkanlah standar yang mengatur bagaimana seharusnya laporan keuangan itu disajikan agar dapat diperbandingkan.

Di Indonesia, standar tersebut diatur oleh IAI. Standar tersebut dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalam PSAK ini mengatur berbagai macam transaksi perusahaan. Perusahaan dituntut untuk

mematuhi standar ini agar laporan keuangan dapat diperbandingkan dan konflik antar pengguna dan manajemen dapat ditekan. Pada saat ini dimana semua perusahaan seperti BUMN, BUMD, atau swasta baik yang bergerak di bidang manufaktur, dagang atau jasa diwajibkan dapat mengatur kegiatan ekonominya secara baik sehingga dapat menunjang kegiatan usaha dengan baik.

Setiap perusahaan mempunyai harta (aktiva) untuk mendukung kegiatan usahanya. Sugiri dan Agus (2011 : 87), mendefinisikan Aktiva atau aset adalah “kekayaan atau sumber ekonomik yang di kuasai perusahaan dan di gunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya (biasanya mencari laba). Sumber ekonomik ini biasanya berupa potensi jasa atau kapasitas produksi yang berwujud (misalnya tanah, gedung, mesin, dan sediaan barang) dan kekayaan finansial (misalnya kas, piutang, dan surat berharga)”. Akan tetapi salah satu kebijakan yang paling sering di lakukan oleh perusahaan adalah kebijakan tentang aktiva tetap (kapasitas produksi yang berwujud). Baik itu dalam pembelian/pengadaannya atau pelepasannya. Hal tersebut di karenakan aset tetap mempunyai nilai material. aset tetap merupakan salah satu akun yang memiliki tingkat kompleksivitas tinggi. Oleh karena itu aset tetap ini di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 16) yang merupakan aturan seluruh proses akuntansi tentang aset tetap, mulai dari pengakuan awal hingga penghentian pengakuan serta penyajian dan pengungkapan. PSAK 16 memaparkan bahwa saat pengakuan awal akan timbul biaya-biaya yang menyusun harga perolehan suatu aset tetap.

Aset tetap atau aktiva tetap dibagi menjadi dua golongan yaitu, aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, berupa: tanah, bangunan, peralatan, dan sebagainya. Aktiva ini berfungsi untuk mendukung menjalankan kegiatannya, yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh dana. Aktiva tetap memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kreditor dan investor. Aktiva memiliki tiga karakteristik utama yaitu, memiliki manfaat ekonomi dimasa mendatang, dikuasai oleh suatu unit usaha, hasil dari transaksi masa lalu. Aktiva tetap lazimnya dicatat sebesar harga perolehannya.

Kondisi tersebut pun membuat perusahaan dituntut memberikan penekanan lebih atas pemahaman perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang tepat. Perlakuan tersebut meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Tentu saja dengan perlakuan yang tepat pada aset tetap akan menghasilkan perlakuan yang tepat pula pada depresiasi perusahaan dan akun-akun lain yang terkait dengan aset tetap. Perlakuan yang benar ini diharapkan dapat mencegah terjadinya salah saji pada laporan keuangan. Kompleksivitas ini muncul karena aset tetap mempunyai masa manfaat yang panjang, Depresiasi mempengaruhi pajak perusahaan dan perusahaan mungkin juga mendapat keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetapnya. Harrison dan Horngren (2010: 382).

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timurmengacu pada PSAK 16 untuk perlakuan akuntansi aset tetap di perusahaan. Pengakuan, pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan atas aset tetap, seluruhnya berpedoman pada PSAK 16. Pernyataan acuan tersebut tertuang dalam kebijakan akuntansi perusahaan dan SOP perusahaan. Walaupun begitu, dengan nilai aset tetap yang cukup material dan kompleksitas yang tinggi, perlu diteliti lebih dalam apakah penerapan atas PSAK 16 dan kebijakan tersebut sudah diterapkan dengan baik. Oleh karena itu penulis memilih judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan PSAK 16 pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur”**

1.2 Penjelasan Judul

Untuk mencegah kesalahtafsiran maka penulis memberikan penjelasan tentang judul tugas akhir ini sebagai berikut :

Perlakuan akuntansi

Kegiatan mencatat posting, pengikhtisaran hingga pembuatan laporan keuangan yang di gunakan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan tidak di maksudkan untuk di jual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang: (a). Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b). Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

PSAK 16

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 adalah Standar Akuntansi yang mengatur tentang aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan pada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalah yaitu Bagaimana Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap berdasarkan PSAK 16 pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang di ambil adalah untuk mengetahui bagaimana Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap berdasarkan PSAK 16 pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang perlakuan akuntansi aset tetap pada PT. PLN Distribusi Jawa Timur agar pembaca mengetahui bagaimana sistematika pengakuan, penghentian pengakuan, penyajian dan pengungkapan aset tetap di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada PT. PLN Distribusi Jawa Timur.

1.5.2 Bagi STIE Perbanas Surabaya

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.

1.5.3 Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam menciptakan penerapan yang lebih baik.

1.6 Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan penyesuaian ruang lingkup penelitian dan prosedur pengumpulan data.

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan penulisan tugas akhir adalah pengakuan sertapencatatan akuntansi piutang usaha pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini akan dibahas secara deskriptif mengenai perlakuan akuntansi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Pembahasan deskriptif ini diawali dengan melakukan pengumpulan data dari obyek penelitian, dalam hal ini ialah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, kemudian melakukan observasi, kemudian data-data yang diperoleh akan dibandingkan dan dianalisis kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.